*Satmata: Journal of Historical Education Studies* *ISSN 3024-9554*
Vol. 4 No. 2, 2026, pp: 461 ~ 479
Open Acces: *https://doi.org/10.61677/satmata.v4i2.1151*

# SOCIO-ECONOMIC CHANGES IN THE DULOHUPA COMMUNITY (2007-2020)

**Ryan Hidayat Talib[1*], Helman Manay[2], Andris K. Malae[3]**

Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia
*ryanryanhidayattalib@gmail.com[1*], helmanmanay@ung.ac.id[2],*
*andrismalae91@gmail.com[3]*
**Corresponding author*
Received Oct 12, 2026; Revised Nov 14, 2026; Accepted Nov 17, 2026; Published Nov 18, 2026

***ABSTRACT***

*This study examines the history of the establishment of Dulohupa Village as a result of the division of Pilohayanga Village in 2007 and the socio-economic changes that occurred within the community until 2020. The purpose of this study is to identify the factors underlying the village expansion and its impacts on the lives of the local community. This research employed the historical method, which consists of four stages: heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data were collected through interviews with community members and village officials, supported by various documents and archives related to the history of Dulohupa Village. The results show that Dulohupa Village was officially established on December 10, 2007, based on Regional Regulation (Perda) No. 43 of 2007 concerning the establishment of Dulohupa Village in Telaga District, Gorontalo Regency. The village expansion was driven by the community's desire to obtain closer government services and to accelerate regional development. After becoming a definitive village, various social and economic changes occurred, including improvements in infrastructure development, public services, and economic activities. The community's economy gradually diversified from being primarily dependent on agriculture to engaging in trade, services, and small-scale enterprises. In 2020, the COVID-19 pandemic affected the economic conditions of the community, prompting the government to distribute Village Fund Direct Cash Assistance (BLT Dana Desa) to support affected residents. This study concludes that the establishment of Dulohupa Village contributed positively to improving community welfare through better development and public services.*

***Keywords:*** *Dulohupa Village, village expansion, socio-economic change, local history, public welfare.*

***ABSTRAK***

*Penelitian ini mengkaji sejarah terbentuknya Desa Dulohupa sebagai desa hasil pemekaran dari Desa Pilohayanga pada tahun 2007 serta perubahan sosial ekonomi masyarakat yang berlangsung hingga tahun 2020. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi pemekaran desa dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian menggunakan metode sejarah yang terdiri atas tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan masyarakat dan aparat desa serta didukung oleh berbagai dokumen dan arsip yang berkaitan dengan sejarah Desa Dulohupa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran Desa Dulohupa terjadi pada tanggal 10 Desember 2007, berdasarkan Perda No. 43 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Dulohupa Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. Hal ini didorong oleh keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan pemerintahan yang lebih dekat serta mempercepat pembangunan wilayah. Setelah resmi menjadi desa definitif, terjadi berbagai perubahan pada aspek sosial dan ekonomi, seperti meningkatnya pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian tetapi juga*

*This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 International license.*
*Copyright ©2026 by Satmata: Journal of Historical Education Studies. Published by Fahr Publishing*

*perdagangan, jasa, dan usaha kecil. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat sehingga pemerintah menyalurkan BLT Dana Desa untuk membantu warga yang terdampak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemekaran Desa Dulohupa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.*

***Kata kunci:*** *Desa Dulohupa, pemekaran desa, perubahan sosial ekonomi, sejarah lokal, kesejahteraan masyarakat.*

## PENDAHULUAN

Sosial ekonomi dapat dipahami sebagai posisi atau kedudukan seseorang dalam lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, tingkat pendidikan, dan pendapatan. Kondisi sosial ekonomi juga mencerminkan upaya bersama masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi berbagai kesulitan dalam kehidupan. Kondisi tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator, seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Perbedaan tingkat pendapatan antardaerah turut memengaruhi keadaan sosial ekonomi masyarakat, karena setiap kelompok memiliki kemampuan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan hidup. Adapun sumber pendapatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi geografis, perkembangan kebutuhan, sektor pariwisata, kebudayaan, serta faktor lainnya (Desa & Kabupaten, 2022).

Desa-desa dan masyarakatnya adalah bagian dari keterbelakangan bangsa Indonesia. Pedesaan menghadapi banyak masalah pengangguran dan kemiskinan. Namun, sumber daya alam yang paling berharga biasanya ada di desa. Menurut Haholongan, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia telah ada sejak lama dan sulit untuk diselesaikan. Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran, pemerintah meluncurkan berbagai program, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tabungan Keluarga Sejahtera (TAKESRA), dan Kredit Keluarga Sejahtera (KUKESRA) (Khalida & Sofyan Sjaf, 2021).

Keadaan sosial ekonomi Indonesia saat ini tidak stabil. Kehidupan sosial dan ekonomi orang Indonesia belum merata di tempat lain. Kehidupan di desa dan kota masih jauh berbeda. Sosial ekonomi adalah tempat di mana orang hidup bersama, baik secara individu maupun kelompok, untuk membentuk komunitas sosial dan kegiatan perekonomian. Komunitas sosial dan kehidupan ekonomi akan sangat memengaruhi lingkungan hidup manusia (Safitri, 2022). Dengan pengembangan ekonomi lokal, pemerintah daerah berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi yang ada. Strategi pengembangan wilayah yang didasarkan pada sumber daya lokal digunakan untuk mencapai tujuan ini (Nur et al., 2025). Sumber daya alam Gorontalo sangat melimpah, terutama pertanian, yang merupakan sektor utama ekonomi Gorontalo, dengan produk utama seperti padi, kelapa, dan cengkih. Selain itu, Gorontalo berada di lokasi strategis, dengan teluk Tomini di sebelah selatan dan laut Sulawesi di sebelah utara (Olii et al., 2023)

Gorontalo adalah salah satu propinsi di pulau Sulawesi yang tidak terlepas dari masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak proporsional. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo dan disparitas distribusi pendapatan adalah beberapa dari banyak masalah yang perlu diselesaikan. Karena Indonesia memiliki strategi dan tujuan pembangunan nasional untuk

mencapai pemerataan hasil pembangunan, aspek pemerataan pendapatan sangat penting untuk dipantau. Jadi, bagaimana pembangunan di daerah tersebut dapat dioptimalkan untuk mengurangi nilai ketimpangan dan mendorong pembangunan ekonomi yang merata dengan mengembangkan sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif (Budiarto et al., 2024).

Di sisi lain, Kabupaten Gorontalo memiliki kondisi sosial yang dinamis dan menghadapi berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan urbanisasi, ketimpangan antarwilayah, serta pemerataan akses terhadap pelayanan publik. Dari aspek demografis, struktur penduduk Kabupaten Gorontalo relatif didominasi oleh kelompok usia produktif yang menjadi potensi dalam pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan perekonomian daerah. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pembangunan, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan dan kesehatan serta kesenjangan akses terhadap pelayanan dasar, khususnya di wilayah perdesaan (Sinaga, 2025).

Dari fenomena itu perubahan sosial ekonomi masyarakat di Gorontalo mengalami peningkatan dalam beberapa sektor tetapi belum merata. Akan tetapi permasalahannya di lapangan adalah penelitian terkait dengan Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Dulohupa: 1) Belum dilakukan riset yang lebih mendalam terkait sosial ekonomi masyarakat Dulohupa 2) Penelitian ini belum ada yang mengkaji dalam konteks sejarah 3) Penelitian merupakan kajian sejarah lokal penting terutama pada masyarakat setempat yang di mana masyarakat harus tahu dan mereka belum ada yang memahami soal itu. Setelah desa ini dimekarkan seiring dengan berjalannya waktu mengalami perkembangan terutama dalam beberapa sektor antaranya pembangunan fasilitas sekolah taman kanak-kanak, poskesdes, dan kantor desa, yang mendukung kegiatan masyarakat, dan juga berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat yang beragam.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu yang relevan sebagai salah satu rujukan dalam mengkaji topik yang diteliti. Salah satu penelitian tersebut dilakukan oleh Helman Manay dengan judul "Kampung Kecil dengan Isu Besar: Deskripsi Kondisi Sosial Ekonomi dan Pendidikan Masyarakat Desa Bangga Kecamatan Paguyaman Pantai Kabupaten Boalemo Tahun 2010–2011." Penelitian tersebut mengkaji kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat pesisir Desa Bangga. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara terbuka, dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Kobi dkk. dengan judul "Kajian Geografi Ekonomi: Studi Kasus Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Suku Bajo di Popayato, Gorontalo" membahas kondisi sosial ekonomi serta interaksi sosial masyarakat Suku Bajo. Hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Suku Bajo masih menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Reinal Putalan dkk. dengan judul "Dinamika Sosial dan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo" mengkaji berbagai perubahan sosial dan lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap

kehidupan masyarakat pesisir di Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi dan dinamika sosial ekonomi masyarakat yang menjadi objek penelitian.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo dalam perspektif sejarah lokal. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, tetapi juga mengkaji proses terbentuknya Desa Dulohupa serta perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setelah terbentuknya desa tersebut. Namun demikian, penelitian ini membahas tentang sosial ekonomi pada periode 2007 hingga 2020 yang membahas tentang interaksi hubungan antara masyarakat pada proses pemekaran desa Dulohupa tahun 2007, serta pemanfaatan sumber daya alam sebagai aktivitas ekonomi masyarakat hingga tahun 2020 khususnya di Desa Dulohupa. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan perubahan sosial ekonomi Desa Dulohupa dalam konteks sejarah dan perkembangan masyarakat setempat. Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni: 1) untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial masyarakat Dulohupa Tahun 2007. 2) untuk mengetahui bagaimana perubahan sosial ekonomi masyarakat Dulohupa Periode 2007-2020.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk menganalisis perkembangan Desa Dulohupa dalam periode 2007 hingga 2020. Kegiatan yang paling awal dan terdahulu dalam tahapan metode penelitian adalah heuristik. Para sejarawan membangun kembali masa lalu berdasarkan sisa-sisa atau ingatan masa lalu. Sisa-sisa dapat diabadikan melalui benda material seperti foto, dokumen, buku, catatan, atau benda nonmaterial seperti ingatan, memori, dan kesaksian. Karena itu merupakan sumber utama bagi sejarawan untuk menemukan jejak, penelusuran jejak melalui sumber-sumber sejarah sangat penting. Karena jumlah sumber yang relevan dan lebih dalam, lebih banyak "bahan baku" untuk penulisan sejarah akan menjadi lebih baik, kemampuan sejarawan dan peneliti sejarah bergantung pada dasar heuristik mereka. Sebaliknya, jumlah sumber sejarah yang tersedia semakin terbatas, dan jumlah penelitian sejarah yang dilakukan semakin terbatas (Arifin, 2023).

Oleh karena itu, sumber heuristik dibagi menjadi dua bagian: sumber primer. Sumber primer adalah sumber utama dari penelitian ini, melalui wawancara dengan masyarakat Desa Dulohupa yang berjumlah 8 orang. Pemilihan ini didasarkan pada teknik pemilihan *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Sebanyak delapan informan dipilih dengan mempertimbangkan peran, pengalaman, dan pengetahuan mereka mengenai sejarah pemekaran serta perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Dulohupa pada periode 2007–2020. Informan tersebut meliputi tokoh yang mengetahui proses pemekaran desa, aparat dan mantan aparat pemerintah desa, serta anggota masyarakat dengan latar belakang pekerjaan yang beragam, seperti petani, wiraswasta, tenaga pendidik, pensiunan PNS, dan ibu rumah tangga. Keragaman latar belakang tersebut diharapkan dapat memberikan

informasi yang relevan mengenai perkembangan pemerintahan, pembangunan infrastruktur, mata pencaharian, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Selain sumber lisan yang digunakan melalui wawancara, penelitian ini juga menggunakan sumber primer dokumen arsip tentang sejarah Desa Dulohupa, seperti proposal perubahan pemekaran Desa Pilohayanga tahun 2007 yang merupakan wilayah induk Desa Dulohupa dan sumber primer SK peraturan daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 43 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Dulohupa Kecamatan Telaga, serta didukung sumber primer seperti arsip foto sejarah mengenai Desa Dulohupa.

Langkah kedua kritik sumber, yaitu langkah analitis dalam penelitian sejarah dilakukan melalui kritik sumber terhadap dokumen yang telah dikumpulkan. Kritik diawali dengan kritik eksternal untuk memastikan keaslian, waktu, tempat, dan penulis dokumen. Selanjutnya, kritik internal dilakukan dengan menilai isi dan keakuratan informasi melalui analisis serta perbandingan antarsumber guna memperoleh fakta sejarah yang dapat dipercaya (Sjamsuddin, 2016). Langkah ketiga interpretasi merupakan proses memberikan makna terhadap fakta atau bukti sejarah. Tahap ini diperlukan karena fakta sejarah tidak dapat menjelaskan maknanya sendiri, sehingga membutuhkan penafsiran dari peneliti atau sejarawan untuk memahami makna dan signifikansinya dalam konteks peristiwa masa lalu (Daliman, 2015).

Langkah terakhir adalah historiografi, yaitu proses menyusun dan menuliskan fakta-fakta sejarah berdasarkan sumber yang telah diseleksi dan ditafsirkan. Pada tahap ini, sejarawan maupun peneliti perlu memperhatikan struktur serta penggunaan bahasa agar hasil penelitian dapat dipahami dengan baik. Secara etimologis, historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia yang berarti penyelidikan dan grafein yang berarti tulisan atau uraian. Dalam perkembangannya, historiografi merujuk pada penulisan hasil penelitian ilmiah mengenai berbagai peristiwa dan tindakan manusia pada masa lampau (Khilmiyah, 2016).

Pendekatan sosiologi digunakan pada penelitian ini merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk hubungan sosial yang terbentuk di antara individu maupun kelompok. Kajian sosiologi mencakup proses terbentuknya kehidupan bersama, perkembangan dan perubahan kelompok sosial, serta nilai, kepercayaan, dan keyakinan yang memengaruhi pola kehidupan masyarakat. Selain itu, sosiologi juga mengkaji struktur sosial, lapisan masyarakat, serta berbagai gejala sosial yang saling berhubungan dalam kehidupan bermasyarakat (Mahyudi, 2023). Pendekatan ini digunakan untuk memahami pola interaksi masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama serta proses terbentuknya struktur sosial di dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Dulohupa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Awal Terbentuknya Desa Dulohupa 2007

Desa Dulohupa merupakan salah satu desa di Kecamatan Telaga yang terbentuk pada tahun 2007. Pembentukannya berawal dari gagasan para tokoh masyarakat yang menginginkan adanya otonomi bagi wilayah dusun terluar Desa Pilohayanga. Gagasan

tersebut didorong oleh kebutuhan untuk mengembangkan wilayah, mengelola potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta mewujudkan pemerataan pembangunan secara lebih seimbang (RPJMDes Desa Dulohupa, 2015). Ide gagasan pemekaran Desa Dulohupa didukung oleh adanya peraturan pemerintah yang memungkinkan pelaksanaan pemekaran desa. Sebagai tindak lanjut, dibentuk panitia pemekaran yang terdiri atas 11 orang. Panitia kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat di lima dusun yang berada di Desa Pilohayanga sebagai desa induk. Sosialisasi tersebut mendapat respons positif dan antusias masyarakat, terutama dari Dusun I dan Dusun II yang menjadi calon wilayah pemekaran (Daud, 2026).

Pemekaran Desa Dulohupa pada saat itu dinilai sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan jumlah penduduk Desa Pilohayanga yang cukup besar dan menjadi salah satu desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Telaga. Selain itu, jarak yang cukup jauh menuju pusat pelayanan pemerintahan menjadi salah satu alasan masyarakat menginginkan adanya pemekaran desa Dulohupa agar akses pelayanan dapat lebih mudah dijangkau (Tomayahu, 2026). Pemekaran Desa Dulohupa berawal dari aspirasi sejumlah tokoh masyarakat yang melihat adanya peluang untuk melakukan pemekaran wilayah. Pertumbuhan penduduk Desa Pilohayanga yang semakin meningkat menjadi salah satu alasan perlunya pemekaran guna mendekatkan akses pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemekaran dilakukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, mendukung pelaksanaan pembangunan, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Daud, 2026).

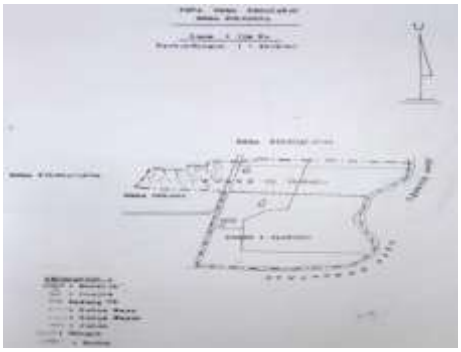
Setelah adanya aturan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pemekaran desa, sejumlah tokoh masyarakat dan generasi muda mulai mengusulkan pembentukan Desa Dulohupa. Orion Daud menjadi salah satu tokoh yang memprakarsai pemekaran tersebut, bersama Yamin Ibrahim. Gagasan ini juga mendapat dukungan dari almarhum Usman Mootalu, mantan Kepala Desa Pilohayanga. Pemekaran didorong oleh kondisi wilayah Pilohayanga yang dinilai terlalu luas sehingga diperlukan pembentukan wilayah baru untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat (Rauf, 2026). Masyarakat di wilayah yang menjadi calon pemekaran menunjukkan respon dan antusias yang tinggi terhadap pembentukan desa baru. Pemekaran dipandang dapat memberikan manfaat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dukungan sumber daya manusia, kondisi wilayah, serta potensi yang dimiliki turut menjadi faktor yang mendukung terbentuknya desa baru (Daud, 2026). Pemekaran wilayah dapat dilakukan pada tingkat provinsi, kabupaten, kota, hingga ke wilayah Desa. Kebijakan ini dilihat dapat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Dengan demikian, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih sederhana, efektif, dan efisien sehingga dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta didukung oleh pelayanan publik yang lebih baik (Sapara & Eprilianto, 2024).

Sumber daya manusia yang mendukung terbentuknya Desa Dulohupa berasal dari berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, pendidik, petani, PNS, pedagang, unsur pemerintahan, BPD, LPM, karang taruna, serta tokoh perempuan. Selain didukung oleh

sumber daya manusia, wilayah calon pemekaran juga memiliki potensi sumber daya alam berupa pertanian lahan basah dan lahan kering, pembuatan batu bata, serta penambangan pasir. Berbagai potensi tersebut menjadi salah satu faktor pendukung dalam pembentukan Desa Dulohupa (Daud, 2026).

Pada awalnya, pemekaran Desa Dulohupa bertujuan untuk mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat. Kondisi Desa Pilohayanga sebagai desa induk dengan jumlah penduduk yang telah mencapai hampir 4.000 jiwa menjadi salah satu pertimbangan pemekaran. Setelah panitia terbentuk, dilakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pemekaran yang bertujuan meningkatkan pelayanan. Masyarakat kemudian menyepakati pemekaran tersebut. Dalam prosesnya, terdapat tiga nama yang diusulkan untuk desa baru, yaitu Pilohayanga Selatan, Po'owo, dan akhirnya ditetapkan nama Dulohupa (Ibrahim, 2026).

Berdasarkan dokumen primer Proposal Pemekaran Desa Pilohayanga tahun 2007, proses pembentukan desa baru telah melalui tahapan administratif dan musyawarah masyarakat. Dalam dokumen tersebut tercatat bahwa pada 3 November 2007 dilaksanakan rapat di Masjid Al-Marhamah Desa Pilohayanga yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti BPD, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, karang taruna, dan TP-PKK (Proposal Perubahan Pemekaran Desa Pilohayanga Tahun 2007, Tahun 2007). Rapat tersebut membahas pergantian nama desa persiapan dari "Po'owo" menjadi "Dulohupa". Berdasarkan hasil musyawarah, seluruh peserta rapat menyepakati penggunaan nama Desa Persiapan Dulohupa. Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pemekaran sekaligus penetapan identitas desa yang baru (Proposal Perubahan Pemekaran Desa Pilohayanga Tahun 2007).



Gambar 1. Peta Persiapan Desa Dulohupa
Sumber: Proposal Perubahan Pemekaran Desa Pilohayanga Tahun 2007

Sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1, luas wilayah Desa Dulohupa yang mencapai 150 hektar menunjukkan adanya ruang yang memadai untuk permukiman serta aktivitas pertanian masyarakat. Dalam proses pemekaran, kondisi wilayah dan jumlah penduduk menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan pemerintahan secara mandiri. Pemekaran Desa Dulohupa pada dasarnya tidak hanya membentuk wilayah administratif baru, tetapi juga bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan pada masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat

(Proposal Perubahan Pemekaran Desa Pilohayanga Tahun 2007).

**Menjadi Desa Definitif 10 Desember 2007**

Pembentukan Desa Dulohupa memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 43 Tahun 2007. Peraturan tersebut menjadi landasan resmi terbentuknya Desa Dulohupa sebagai desa baru di Kecamatan Telaga yang ditetapkan pada 10 Desember 2007 (Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Dulohupa Kecamatan Telaga, 2007).

Berdasarkan peraturan daerah tersebut, Desa Dulohupa terbentuk dari sebagian wilayah Desa Pilohayanga yang meliputi Dusun Ilomata dan Dusun Iloponu. Kedua dusun tersebut kemudian menjadi bagian dari wilayah administratif Desa Dulohupa setelah pemekaran, sehingga terbentuklah wilayah desa baru yang sebelumnya berada dalam administrasi Desa Pilohayanga (Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Dulohupa Kecamatan Telaga, 2007). Desa Dulohupa merupakan desa yang terbentuk melalui pemekaran dari Desa Pilohayanga sebagai desa induk, dengan pembagian wilayah dari Desa Pilohayanga, Desa Dulohupa, dan Desa Pilohayanga Barat. Nama "Dulohupa" dipilih berdasarkan karakter masyarakat yang dikenal memiliki sikap patuh serta mampu menerima dan menjalankan berbagai aturan yang berlaku. Nama tersebut juga mencerminkan nilai bahwa setiap persoalan yang dihadapi masyarakat dapat diselesaikan melalui musyawarah. Oleh karena itu, nama Dulohupa menggambarkan kehidupan masyarakat yang mengutamakan keamanan, ketenteraman, kedamaian, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat (RPJMDes Desa Dulohupa, 2015).



Gambar 2. Kantor Desa Dulohupa sejak 2009-sekarang
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Dengan adanya kekuatan dan kebersamaan masyarakat, Desa Dulohupa secara bertahap mengalami perkembangan dalam berbagai bidang, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan masyarakat. Perkembangan tersebut ditandai dengan pembangunan kantor desa, taman kanak-kanak (TK), Polindes, serta fasilitas pelayanan kesehatan. Pada awal tahap terbentuknya desa, pelayanan pemerintahan kantor desa masih dilakukan dengan memanfaatkan rumah milik masyarakat sebagai kantor desa sementara. Pembangunan kantor desa secara permanen kemudian mulai dilaksanakan pada tahun

2009. Fasilitas kantor Desa tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 (Daud, 2026).

**Perkembangan Ekonomi Masyarakat Dulohupa 2007-2020**

Sebagian besar masyarakat Desa Dulohupa menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian. Selain bekerja sebagai petani, masyarakat juga memiliki pekerjaan lain, seperti buruh tani, pembuatan batu bata, buruh bangunan, pelaku usaha kios atau UMKM, serta pengrajin. Potensi desa yang cukup menonjol terdapat pada sektor pertanian, khususnya lahan persawahan yang menghasilkan padi dan jagung. Selain itu, terdapat tanaman keras yang setelah melalui proses adaptasi mampu tumbuh dan berproduksi dengan baik pada wilayah yang relatif rendah dengan kondisi tanah kering. Tanaman perkebunan yang menjadi salah satu komoditas andalan masyarakat setempat antara lain mangga dan kelapa. Berbagai kegiatan pertanian dan perkebunan tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian Desa Dulohupa (Profil Desa Dulohupa).

Perubahan sosial merupakan proses yang berlangsung seiring berjalannya waktu dan dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan maupun keinginan individu atau kelompok untuk menciptakan perubahan. Perubahan tersebut dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, dan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi seseorang dapat dilihat dari kedudukannya dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti jenis pekerjaan, tingkat pendapatan, pendidikan, usia, kondisi tempat tinggal (Qomariya et al., 2021).

Sejak dimekarkan pada tahun 2007, Desa Dulohupa mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian, buruh harian lepas, dan perdagangan. Aktivitas pertanian masyarakat terbagi atas pertanian lahan kering, seperti tanaman jagung, dan pertanian lahan basah berupa persawahan. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan potensi yang ada melalui kegiatan produksi pembuatan batu bata. Berbagai pekerjaan tersebut menjadi sumber pendapatan bagi sebagian masyarakat karena sektor pertanian merupakan salah satu lapangan pekerjaan utama di Desa Dulohupa yang didukung oleh ketersediaan sumber daya alam di wilayah Desa Dulohupa (Daud, 2026).

Tabel 1. Mata Pencaharian Penduduk Desa Dulohupa

| | Pekerjaan | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tahun** | **Pegawai negeri** | **Peternakan** | **Perkebunan** | **Konstruksi** | **Perdagangan** | **Transportasi** | **TNI/ POLRI** | **Pegawai swasta** | **Jasa lainnya** | **TBM** |
| 2008 | 49 | 2 | 51 | 2 | 25 | 20 | 5 | 47 | 30 | 130 |
| 2010 | 37 | 15 | 51 | 2 | 25 | 50 | 3 | 9 | 66 | 262 |
| 2011 | 43 | 15 | 21 | 2 | 39 | 60 | 3 | 11 | 66 | 262 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 43 | 15 | 21 | 2 | 39 | 60 | 3 | 11 | 66 | 262 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | 258 | - | - | 28 | 73 | - | 7 | 35 | 375 | 40 |
| 2016 | 258 | - | - | 28 | 73 | - | 7 | 35 | 375 | 40 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kecamatan Telaga dalam Angka 2008-2020

Sebagaimana disajikan pada tabel 1, berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Kecamatan Telaga, mata pencaharian masyarakat Desa Dulohupa mengalami perubahan selama periode 2008–2020. Pada tahun 2008, sebagian besar penduduk bekerja di sektor tani bahan makanan (TBM), disusul oleh sektor perkebunan, pegawai negeri, pegawai swasta, dan jasa lainnya. Memasuki tahun 2010–2011, jumlah pekerja di sektor TBM, jasa, dan transportasi mengalami peningkatan, sedangkan sektor perkebunan mulai mengalami penurunan.

Pada tahun 2015–2016 terjadi perubahan yang lebih nyata, ditandai dengan meningkatnya jumlah pegawai negeri, pekerja di sektor jasa lainnya, perdagangan, TBM serta konstruksi. Sementara itu, beberapa sektor seperti peternakan, perkebunan, dan transportasi tidak lagi tercatat dalam data. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian menuju sektor jasa dan pekerjaan formal, yang mencerminkan perkembangan sosial ekonomi di Desa Dulohupa namun demikian, data untuk tahun 2012, 2014, dan 2017–2020 tidak tersedia.

Perubahan komposisi mata pencaharian tersebut menunjukkan adanya pergeseran aktivitas ekonomi masyarakat Desa Dulohupa. Selain masih bergantung pada sektor pertanian, sebagian masyarakat mulai beralih ke sektor jasa, perdagangan, dan pekerjaan formal, yang mengindikasikan adanya perkembangan ekonomi dan semakin beragamnya peluang kerja di Desa Dulohupa.

Mata pencaharian masyarakat Desa Dulohupa mengalami perkembangan dan semakin beragam dari waktu ke waktu. Pada tahun 2007, sebagian besar masyarakat masih bekerja sebagai petani, baik petani lahan basah maupun lahan kering, sementara sebagian lainnya bekerja sebagai buruh harian lepas. Setelah Desa Dulohupa dimekarkan dan menjadi desa definitif, hingga tahun 2020 mata pencaharian masyarakat semakin bervariasi. Meskipun sektor pertanian masih menjadi salah satu mata pencaharian yang dominan, masyarakat juga mulai bekerja sebagai wiraswasta dan buruh harian lepas. Sebagian buruh harian lepas tersebut bekerja dalam kegiatan pembuatan batu bata yang menjadi salah satu aktivitas ekonomi masyarakat di Desa Dulohupa (Usman, 2026).

Seiring berjalannya waktu, sejak tahun 2007 sampai 2020, masyarakat Desa Dulohupa memiliki berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagian masyarakat bekerja sebagai buruh harian lepas, pekerja pada usaha pembuatan batu bata, serta petani. Dalam sektor pertanian, sebagian masyarakat, khususnya petani lahan kering, sangat bergantung pada kondisi cuaca. Faktor iklim menjadi salah satu hal yang memengaruhi hasil produksi pertanian, sehingga turut menentukan pendapatan yang diperoleh masyarakat. Pendapatan dari kegiatan pertanian tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan kehidupan sehari-hari (Said, 2026).

Tingkat pendapatan masyarakat Desa Dulohupa selama periode 2007–2020 mengalami perubahan yang relatif labil, yaitu dapat meningkat maupun menurun sesuai dengan kondisi pekerjaan yang dijalankan. Hal tersebut berkaitan dengan beragamnya jenis mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah masyarakat yang bekerja dalam usaha pembuatan batu bata, yang pendapatannya dapat mengalami penurunan pada kondisi tertentu. Ketika pendapatan dari pekerjaan tersebut berkurang, sebagian masyarakat

memilih untuk sementara beralih bekerja sebagai buruh harian lepas di tempat lain. Dengan demikian, tingkat pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Usman, 2026).



Gambar 3. Daftar Penerima Bantuan BLT Tahun 2020
Sumber: Arsip Daftar penyaluran Blt Dana Desa Dulohupa
Kec. Telaga Tahun Anggaran 2020

Pemerintah Desa Dulohupa melalui kepala desa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakatnya. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program bantuan, seperti PKH dan BLT yang bersumber dari dana desa. Bantuan tersebut turut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Dokumentasi daftar penerima bantuan tersebut disajikan pada Gambar 3 (Maruwae, 2026).



Gambar 4. Perbaikan Infrastruktur Jalan Desa Dulohupa
Sumber: Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Dulohupa Tahun 2018

Pembangunan dan perbaikan fasilitas infrastruktur jalan di Desa Dulohupa telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Akses jalan di Dusun I dan Dusun II relatif memadai, meskipun masih terdapat beberapa ruas jalan yang berupa jalan pengerasan. Kondisi infrastruktur ini berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta memperlancar aktivitas ekonomi, sehingga dapat menunjang peningkatan produktivitas masyarakat Desa Dulohupa (Usman, 2026).

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4, pembangunan infrastruktur jalan di Desa Dulohupa memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama melalui perbaikan sejumlah ruas jalan yang sebelumnya berlubang. Setelah dilakukan pengerasan dan perbaikan, akses transportasi menjadi lebih mudah, termasuk untuk mengangkut hasil perkebunan menggunakan kendaraan roda empat. Perbaikan tersebut sangat membantu masyarakat, khususnya petani, dalam mendukung kegiatan pertanian dan mendistribusikan hasil produksinya (Said, 2026).

Ketersediaan infrastruktur yang memadai memberikan kemudahan bagi masyarakat Desa Dulohupa dalam berbagai bidang, mulai dari pelayanan pendidikan hingga aktivitas pertanian, khususnya dalam pengangkutan hasil produksi. Selain itu, industri batu bata menjadi salah satu potensi ekonomi desa yang cukup besar. Akses transportasi yang semakin baik memudahkan konsumen dari luar wilayah untuk menjangkau lokasi produksi batu bata. Kondisi tersebut turut mendukung perputaran ekonomi desa dan berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat setempat (Kartono, 2026).

Ekonomi masyarakat merupakan rangkaian aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh individu, keluarga, maupun kelompok dalam suatu komunitas untuk memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan taraf kesejahteraan. Dalam konsep ini, masyarakat berperan sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki guna mendukung keberlangsungan kehidupan ekonomi mereka (Junaedi, 2026).

Tabel 2. Fasilitas Pendidikan Desa Dulohupa

| No | Sarana Pendidikan | Jumlah | Lokasi (Dusun) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Iloponu | Ilomata |
| 1. | TK | 1 | ✓ | |
| 2. | SD/MI | 1 | ✓ | |

Sumber Data: RPJMDes Desa Dulohupa 2021

Berdasarkan data yang tercatat pada RPJMDes Desa Dulohupa yang telah disajikan pada tabel 2, tentang fasilitas pendidikan di Desa Dulohupa tahun 2021, dapat diketahui bahwa fasilitas pendidikan di Desa tersebut masih tergolong terbatas. Desa Dulohupa hanya memiliki dua sarana pendidikan, yaitu 1 unit TK dan 1 unit SD/MI. Kedua fasilitas pendidikan tersebut berada di Dusun Iloponu, sedangkan di Dusun Ilomata belum tersedia sarana pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pusat pelayanan pendidikan masih terfokus pada satu dusun sehingga masyarakat di dusun lain kemungkinan harus menempuh jarak tertentu untuk mengakses pendidikan. Meskipun demikian, keberadaan TK dan SD/MI menjadi indikator bahwa Desa Dulohupa telah memiliki fasilitas pendidikan dasar yang mendukung proses belajar masyarakat, khususnya bagi anak usia dini dan pendidikan dasar. Salah satu fasilitas pendidikan yang terdapat di Desa Dulohupa adalah SD Negeri 8 Telaga keberadaan fasilitas pendidikan Sekolah Dasar tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.




Gambar 5. Fasilitas Sekolah Dasar Negeri 8 Telaga terletak di Desa Dulohupa
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara umum, kesejahteraan sosial mencakup berbagai aspek, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, stabilitas ekonomi, serta lingkungan sosial yang mendukung (Fentiani et al., 2025).

**Perkembangan Sosial Masyarakat Dulohupa 2007-2020**

Perkembangan tingkat pendidikan di Desa Dulohupa menunjukkan kemajuan yang cukup baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari menurunnya jumlah anak yang mengalami putus sekolah serta tersedianya beberapa fasilitas lembaga pendidikan di wilayah desa. Salah satu bentuk perkembangan tersebut ditandai dengan keberadaan lembaga pendidikan TK/RA dan Sekolah Dasar Negeri. Meningkatnya ketersediaan fasilitas pendidikan tersebut juga mencerminkan semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi kehidupan dan masa depan generasi berikutnya (Profil Desa Dulohupa). Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan keluarga, tingkat pendidikan masyarakat Desa Dulohupa mengalami perkembangan. Pada awal pemekaran, pendidikan masyarakat masih didominasi lulusan SD, sedangkan saat ini semakin banyak yang mencapai jenjang SLTA bahkan hingga perguruan tinggi (Kartono, 2026).

Tabel 3. Tingkat Pendidikan Terakhir di Tamatkan di Desa Dulohupa

| Tahun | Tidak Tamat SD | SD | SLTP | SLTA | DI/DII | DIII | S1 | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 210 | 240 | 227 | 165 | 6 | 1 | 20 | 869 |
| 2009 | 895 | 319 | 135 | 240 | 4 | 4 | 29 | 1626 |
| 2011 | 918 | 345 | 116 | 174 | 5 | 9 | 32 | 1599 |
| 2013 | 918 | 345 | 116 | 174 | 5 | 9 | 32 | 1599 |
| 2015 | 180 | 488 | 141 | 202 | - | - | 51 | 1062 |

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kecamatan Telaga dalam Angka 2008-2015

Sebagaimana yang disajikan pada tabel 3, berdasarkan data yang tercatat pada Badan Pusat Statistik Kecamatan Telaga, tingkat pendidikan terakhir masyarakat Desa Dulohupa selama periode 2008–2015 masih didominasi oleh penduduk yang menempuh pendidikan dasar. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 210 orang belum menamatkan SD, 240 orang tamat SD, 227 orang tamat SLTP, 165 orang tamat SLTA, 6 orang lulusan DI/DII, 1 orang lulusan DIII, dan 20 orang lulusan S1, sehingga jumlah keseluruhannya mencapai 869 orang.

Pada tahun 2009, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan meningkat menjadi 1.626 orang. Penduduk yang tidak tamat SD mencapai 895 orang, sedangkan lulusan SD berjumlah 319 orang, SLTP 135 orang, SLTA 240 orang, DI/DII 4 orang, DIII 4 orang, dan S1 sebanyak 29 orang. Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah.

Selanjutnya, pada tahun 2011 dan 2013 komposisi tingkat pendidikan tidak mengalami perubahan. Jumlah penduduk yang tidak tamat SD tercatat sebanyak 918 orang, lulusan SD 345 orang, SLTP 116 orang, SLTA 174 orang, DI/DII 5 orang, DIII 9 orang, dan S1 sebanyak 32 orang. Kesamaan data tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perubahan yang signifikan pada tingkat pendidikan masyarakat selama kedua tahun tersebut.

Perkembangan mulai terlihat pada tahun 2015. Jumlah penduduk yang tidak tamat SD menurun menjadi 180 orang, sementara lulusan SD meningkat menjadi 488 orang. Selain itu, jumlah lulusan SLTP mencapai 141 orang, lulusan SLTA sebanyak 202 orang, dan lulusan S1 meningkat menjadi 51 orang. Pada tahun yang sama tidak tercatat lulusan DI/DII maupun DIII. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan tingkat pendidikan masyarakat Desa Dulohupa. Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan menengah dan perguruan tinggi mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat mendukung perkembangan sosial dan ekonomi desa.

Perkembangan tingkat pendidikan masyarakat Desa Dulohupa selama periode 2008–2015 menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Meskipun pendidikan dasar masih mendominasi, jumlah masyarakat yang berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas hingga perguruan tinggi, terutama jenjang S1, terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya turut mendorong perubahan sosial dan ekonomi di Desa Dulohupa.

Berdasarkan tabel 3 tersebut, data statistik mengenai tingkat pendidikan masyarakat Desa Dulohupa yang digunakan dalam penelitian ini hanya tersedia untuk periode 2008–2015 berdasarkan publikasi data Badan Pusat Statistik Kecamatan Telaga dalam angka. Data untuk periode 2016–2020 tidak tersedia dalam sumber data statistik yang digunakan, sehingga perkembangan tingkat pendidikan masyarakat pada periode tersebut belum dapat dijelaskan secara kuantitatif melalui data yang disajikan dalam tabel. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kondisi pendidikan hingga tahun 2020 didasarkan pada informasi

yang diperoleh melalui wawancara dengan informan. Keterbatasan ini menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam memahami perkembangan pendidikan masyarakat Desa Dulohupa selama periode penelitian.

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Dulohupa pada tahun 2007 sudah cukup berkembang, tetapi mengalami kemajuan yang lebih besar hingga tahun 2020. Perkembangan tersebut terlihat dari semakin terkoordinasinya masyarakat dalam mengikuti pendidikan mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi serta berkurangnya angka putus sekolah dibandingkan pada awal pemekaran tahun 2007 (Daud, 2026).



Gambar 6. Fasilitas TK Desa Dulohupa
Sumber: Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Dulohupa Tahun 2016

Dari segi infrastruktur, Desa Dulohupa telah memiliki berbagai fasilitas yang cukup memadai, seperti kantor desa, Poskesdes, Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 6 atau PAUD, serta SD Negeri 8 Telaga. Perkembangan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya pembangunan yang dilakukan melalui kerja sama masyarakat dengan instansi pemerintah terkait (Kartono, 2026).



Gambar 7. Fasilitas Poskesdes Desa Dulohupa
Sumber: Surat Pertanggung Jawaban Dana Desa Dulohupa Tahun 2016

Desa Dulohupa saat ini memiliki fasilitas poskesdes, sebagaimana yang disajikan pada Gambar 7, yang berada di Desa Dulohupa namun kegiatannya berskala kecamatan dan hal ini tentu memudahkan pelayanan bagi masyarakat Dulohupa (Profil Desa

Dulohupa). Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pedesaan dan taraf hidup individu serta menanggulangi kemiskinan. Hal ini dicapai melalui pemenuhan kebutuhan mendasar, memajukan infrastruktur desa, menumbuhkan potensi ekonomi lokal, dan menjamin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan (Kharisma et al., 2024).

Pemekaran wilayah merupakan salah satu fenomena yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia. Secara umum, pemekaran wilayah diartikan sebagai proses pembentukan daerah otonom baru yang berasal dari wilayah daerah induk. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, serta memperkuat identitas dan potensi daerah. Dengan demikian, pemekaran wilayah tidak hanya dipahami sebagai perubahan batas administratif, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif serta menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi wilayah dengan cakupan yang luas dan kondisi yang beragam (Ibanes, 2026).

Perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada struktur sosial dalam kehidupan masyarakat. Struktur sosial tersebut mencakup pola-pola perilaku serta interaksi sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat. Selain itu, bahwa perubahan sosial juga mencakup berbagai unsur yang berkaitan dengan struktur sosial, seperti norma, nilai, dan berbagai fenomena kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat (Baharudin, 2024).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Manay (2021), Kobi & Hendra (2020), dan Putalan et al. (2025) telah membahas kondisi sosial ekonomi, pendidikan, serta dinamika kehidupan masyarakat di berbagai wilayah. Selain itu, penelitian mengenai rekonstruksi sejarah melalui sumber lisan Subair (2024) dan hubungan antara pemekaran desa dengan pembangunan serta pelayanan publik: Bukti di Indonesia Wahida et al. (2023) juga telah memberikan gambaran mengenai aspek-aspek tersebut. Meskipun memiliki kesamaan dalam mengkaji kehidupan masyarakat dan perkembangan wilayah, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji proses terbentuknya Desa Dulohupa melalui pemekaran dari Desa Pilohayanga pada tahun 2007 serta perubahan sosial ekonomi masyarakat hingga tahun 2020. Pembahasan mencakup perkembangan pemerintahan desa, infrastruktur, pendidikan, dan mata pencaharian masyarakat dengan memanfaatkan sumber lisan melalui wawancara serta arsip gambar yang berkaitan dengan Desa Dulohupa. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kajian perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Dulohupa dalam perspektif sejarah lokal yang menghubungkan proses pemekaran desa dengan perkembangan kehidupan masyarakat selama periode 2007–2020.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi historis bagi masyarakat dan pemerintah Desa Dulohupa dalam memahami proses pemekaran serta perubahan sosial ekonomi yang berlangsung pada periode 2007–2020. Dokumentasi mengenai perkembangan infrastruktur, pelayanan publik, dan mata pencaharian masyarakat dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi

pembangunan desa serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat pada masa mendatang. Hal ini sejalan dengan kajian Gaspersz (2023) yang menunjukkan pentingnya infrastruktur dalam kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemahaman terhadap perubahan kehidupan sosial masyarakat dapat membantu pemerintah desa memperhatikan aspek partisipasi dan hubungan sosial dalam pelaksanaan pembangunan, sebagaimana dibahas oleh (Kurniawan et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pendokumentasian sejarah lokal sekaligus menyediakan informasi yang relevan bagi pemahaman perkembangan dan perencanaan pembangunan Desa Dulohupa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil kajian disimpulkan bahwa, kondisi sosial ekonomi masyarakat Dulohupa pada periode 2007–2020 dimana proses pemekaran desa Dulohupa pada tahun 2007. Pemekaran wilayah yang berasal dari Dusun I dan Dusun II Desa Pilohayanga yang menjadi cakupan wilayah baru Desa Dulohupa, dilakukan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pemerataan pembangunan, mengingat jumlah penduduk desa induk yang semakin besar serta jarak pelayanan yang cukup jauh. Perkembangan sosial ekonomi masyarakat Desa Dulohupa pada 2007–2020 menunjukkan perubahan yang cukup baik. Dalam aspek ekonomi, masyarakat tidak hanya bekerja sebagai petani lahan basah dan lahan kering, tetapi juga sebagai PNS, buruh harian lepas, pembuat batu bata, dan pedagang. Dengan tersedianya beragam mata pencaharian tersebut serta didukung oleh potensi sumber daya yang tersedia dan menjadi sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pada tahun 2020 pemerintah Desa Dulohupa memberikan bantuan BLT yang bersumber dari dana desa dalam upaya meningkatkan sosial ekonomi masyarakatnya akibat pandemi COVID-19. Dalam aspek sosial, kesadaran masyarakat terhadap pendidikan juga mengalami peningkatan, ditandai dengan semakin banyaknya masyarakat yang menempuh pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, meskipun masih terdapat masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan dasar.

## REFERENSI


Arifin, F. (2023). *Metode sejarah: Merencanakan dan menulis penelitian sejarah* (Imam Subchi, Ed.). Deepublish Digital.

Baharudin, E. (2024). *Pengantar sosiologi* (Sri Murni, Ed.). Damera Press.

Budiarto, S. A., Dai, S. I. S., Santoso, I. R., & Mulyati, Y. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan, 2*(2), 238–244. https://doi.org/10.37905/jsep.v2i2.29298

Daliman, A. (2015). *Metode penelitian sejarah*. Ombak.

Daud, O. (2026). Wawancara.

Desa, D. I., & Kabupaten, R. (2022). Peran masyarakat dalam mengembangkan kain songke. *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 1*(1), 32–38. https://doi.org/10.18860/dsjpips.v1i1.1026

Desa Dulohupa. (2022). *Profil Desa Dulohupa*. Kabupaten Gorontalo: Kantor Desa Dulohupa.

Fentiani, S. A., Achdiani, Y., & Nastia, G. I. P. (2025). Peran kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas, 7*(1), 1–10. https://doi.org/10.23969/humanitas.v7i1.21718

Gaspersz, P. (2023). Linking public service availability to village welfare. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning, 4*(2), 136–158. https://doi.org/10.46456/jisdep.v4i2.455

Gorontalo, P. P. (Tahun 2007, Kantor Desa Pilohayanga). *Proposal perubahan pemekaran Desa Pilohayanga tahun 2007*. Kantor Desa Pilohayanga.

Ibanes, R. (2026). *Pemekaran wilayah tantangan dan peluang bagi kemajuan pembangunan daerah* (Ujang Badru Jaman, Ed.). PT. Arunika Aksara Karya.

Ibrahim, Y. (2026). Wawancara.

Junaedi, I. W. R. (2026). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat: Teori, strategi, dan implementasi* (Saskia Putri Nabila, Ed.). CV. Nusantara Press Indonesia.

Kartono. (2026). Wawancara.

Khalida, R., & Sjaf, S. (2021). Hubungan kondisi sosial ekonomi pemilik UMKM dengan persepsi terhadap karakteristik sociopreneur. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 5*(5), 619–646. https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i5.878

Kharisma, I. L., Putri, G. R., Rahman, W. J., Nida Khofifah, N. S., Putra, S. A., Nuryani, M., Rakasiwi, G., Kamdan, & Insany, G. P. (2024). Transformasi sosial melalui sosialisasi kepemimpinan dalam meningkatkan perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Cimaja. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Abdi Putra, 4*(3), 284–288. https://doi.org/10.52005/abdiputra.v4i3.237

Khilmiyah, A. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Samudra Biru.

Kobi, W., & Hendra, H. (2020). Kajian geografi ekonomi: Studi kasus kondisi sosial ekonomi masyarakat Suku Bajo di Popayato, Gorontalo. *Jambura Geo Education Journal, 1*(1), 16–25. https://doi.org/10.34312/jgej.v1i1.4637

Kurniawan, B., Bakhtiar, Y., Hasrul, H., & S, N. (2023). Pemekaran jorong dan pengaruhnya terhadap hubungan sosial masyarakat. *Journal of Education, Cultural and Politics, 3*(1), 28–34. https://doi.org/10.24036/jecco.v3i1.133

Mahyudi, D. (2023). Pendekatan antropologi dan sosiologi dalam studi Islam. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, 9*(2), 1–27. https://doi.org/10.30821/ihya.v9i2.17900

Manay, H. (2021). Kampung kecil dengan isu besar: Deskripsi kondisi sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat Desa Bangga Kec. Paguyaman Pantai Kab. Boalemo tahun 2010–2011. *Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Jambura, 3*(1), 15–38. https://doi.org/10.37905/jhcj.v3i1.19375

Maruwae, L. (2026). Wawancara.

Nur, T. I. Z. S., Saleh, S. E., Dai, S. I. S., & Mulyati, Y. (2025). Strategi pengembangan potensi ekonomi lokal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Gorontalo. *Jurnal Studi Ekonomi dan Pembangunan, 2*(3), 389–407. https://doi.org/10.37905/jsep.v2i3.31689

Olii, R. R. P., Sudirman, S., & Halid, R. M. (2023). Analisis sektor ekonomi Provinsi Gorontalo tahun 2017–2022. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 11*(2), 249–257. https://doi.org/10.23887/ekuitas.v11i2.68029

Pemerintah Desa Dulohupa. (2015). *RPJMDes Desa Dulohupa*.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo. (2007). Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 43 Tahun 2007 tentang pembentukan Desa Dulohupa Kecamatan Telaga. *Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007*. Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo.

Putalan, R., Azzahra Sudirman, A., Nusi, F., & Ariany, S. palma. (2025). Dinamika sosial dan ekonomi masyarakat pesisir di Kelurahan Leato Utara, Kota Gorontalo. *Journal Of Fisheries Agribusiness, 2*(2), 11–14. https://doi.org/10.56190/jfa.v2i2.42

Qomariya, F. N., Soetarto, H., & Alfiyah, N. I. (2021). Migrasi dalam perubahan sosial ekonomi masyarakat Desa Talango. *Public Corner, 16*(1), 79–96. https://doi.org/10.24929/fisip.v16i1.1597

Rauf, B. M. (2026). Wawancara.

Safitri, A. (2022). Kondisi sosial ekonomi keluarga buruh perkebunan karet di Desa Bangun Sari Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. *KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi dan Administrasi Publik, 1*(1), 64–76. https://doi.org/10.30596/keskap.v1i1.14074

Said, H. (2026). Wawancara.

Sapara, L. A., & Eprilianto, D. F. (2024). Kajian pemekaran desa dalam upaya pemerataan pembangunan (Studi kasus di Desa Persiapan Ngandel Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo). *Publika, 3*(6), 727–738. https://doi.org/10.26740/publika.v12n3.p727-738

Sinaga, K. (2025). *Perubahan iklim dan pembangunan keberlanjutan* (Umsu Press, Ed.; Cetakan Pertama).

Sjamsuddin, H. (2016). *Metodologi sejarah* (III). Ombak.

Subair, A. (2024). Rekonstruksi sejarah menggunakan sumber lisan dalam penulisan sejarah lokal. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU), 2*(2), 99–107. https://doi.org/10.59435/jimnu.v2i2.422

Tomayahu, H. (2026). Wawancara.

Usman, S. (2026). Wawancara.

Wahida, S., Nurjannah, N., Wijaya, E. A., Al-Qarnain, M. W., & Guna, A. D. (2023). The effect of village expansion on public development and services: Evidence in Indonesia. *Asian Political Science Review, 6*(1), 1–11. https://doi.org/10.2139/ssrn.4546428